

B. SARAN

Sebaiknya dalam melakukan penarikan kembali kepala perwakilan diplomatik oleh negara pengirim sebagai bentuk protes terhadap kebijakan negara penerima, diperlukan pertimbangan yang sangat matang. Kebiasaan ini dapat merenggangkan hubungan antara negara penerima dan negara pengirim yang sudah dijalin dengan baik sebelumnya. Pertimbangan matang sangat diperlukan agar nantinya tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi negara maupun warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Literatur

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.
- Ahmad, M. *Hak-Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik di Indonesia*. Bandung: FH Unpad. 1981.
- AK, Syahmin. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2008.
- AK, Syahmin. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung: Armico. 1984
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan. 1988.
- Badri, J. *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: Tintamas. 1960.
- Effendi, Masyur. *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Surabaya: Usaha Nasional. 1993.
- Glahn, Gerhard Von. *Law Among Nations 2nd Edition*. New York: Macmillian Company. 1970.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Isplancius. *Konsep Dasar Hukum Internasional*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. 2014.
- Isjwara, F. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 1972.
- Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni. 2003.

- Lauterpacht, Oppenheim. *International Law, Vol. 18th ed.* London: Longmans Green & Co. 1960.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.* Bandung: Alumni. 2000.
- Nussbaum, Arthur. *Sejarah Hukum Internasional Bagian Pertama dan Bagian Kedua*, terj. Sam Suhaedi. Bandung: Binacipta. 1971.
- Nicolson, Harold. *Diplomacy 2nd ed.* London-Oxford: University Press. 1950.
- Parthiana, I wayan. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Prawirasaputra, Sumpena. *Politik Luar Negeri Indonesia.* Bandung: Remadja Karya CV. 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Publik Internasional.* Jakarta: PT Pembimbing Masa. 1967.
- S, Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009).* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012.
- Sastroamidjojo, Ali. *Pengantar Hukum Internasional.* Jakarta: Bhratara. 1971.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Situni, F. A. Whisnu. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional.* Bandung: CV. Mandar Maju. 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Pres. 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitjio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 1*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 1989.
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika. 1989.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: PT Alumni. 2005.

Suryono, Edy dan Arisoedha, Moenir. *Hukum Dilomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa. 1991.

Syamsudin, M. *Operasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.

Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: Laksbang Justitia. 2009

Wiraatmadja, Suwardi. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Alumni. 1970.

Peraturan Perundang-Undangan

Piagam PBB

Statuta Mahkamah Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966

The Death Penalty Abolition Act 1973

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Protocol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik: dengan Tujuan Penghapusan Hukuman Mati 1989

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sumber-Sumber Lain

Jurnal

Rukmana, Indra. *Perdagangan Narkotika dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional, dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.*

Official Records, U.N. Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, Vienna, 2 Maret – 14 April 1961, Vol. 1, U.N. Publication, 1961.

Internet

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan / Konsulat, 2015, <http://www.kemlu.go.id/id/kedutaan/default.aspx> diakses pada tanggal 9 Maret 2017.

Nicholas Martland, Australian Aborigines and Makassan Trepangers, 28 May 2012, <http://blogs.bl.uk/untoldlives/2012/05/australian-aborigines-and-makassan-trepangers.html> diakses pada tanggal 15 April 2017.

BBC Indonesia, Pasang Surut Hubungan Australia dan Indonesia: Tegang namun Pragmatis, 9 Januari 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527300>, diakses pada tanggal 9 Maret 2017.

Andi Muttya Keteng, Dubes Indonesia untuk Australia Resmi Ditarik, 18 November 2013, <http://news.liputan6.com/read/749326/dubes-indonesia-untuk-australia-resmi-ditarik>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017.

Yolanda Ryan Armindya, Abbott Tarik Dubesnya di Jakarta: Australia-RI di Masa Gelap, 29 April 2015, <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/29/120661913/abbott-tarik-dubesnya-di-jakarta-australia-ri-di-masa-gelap>, diakses pada tanggal 15 April 2017.

Hindra Liauw, Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok “Bali Nine”, 29 April 2015, <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

BBC Indonesia, Permohonan Grasi Anggota “Bali Nine” ditolak, 22 Januari 2015, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_andrew_chan_grasi diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

- BBC Indonesia, Dubes Australia untuk Indonesia kembali ke Jakarta, 10 Juni 2015, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150610_indonesia_dubes_australia diakses pada tanggal 17 April 2017.
- Essra Try Reza, Lika-liku Australia menghapus hukuman mati, 19 Februari 2015, <http://www.antaraneews.com/berita/480901/lika-liku-australia-menghapus-hukuman-mati>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017.
- Ressa Yuspita, Hukuman Mati Terkait Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional, 14 September 2016, <http://ressayuspita.blogs.uny.ac.id/2016/09/14/8/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017.
- Hindra Liauw, Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok “*Bali Nine*”, 29 April 2015, <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.
- Ressa Yuspita, Hukuman Mati Terkait Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional, 14 September 2016, <http://ressayuspita.blogs.uny.ac.id/2016/09/14/8/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017.
- Damang, Latar Belakang Regulasi Narkotika, 25 November 2011, <http://www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkotika.html>, diakses pada 11 Juni 2017
- Immanuel Lubis, Tehran Case, 8 Juni 2011, http://www.kompasiana.com/immanuelsnotes/teheran-case_5500da73a333110d17510188, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017.
- Immanuel Lubis, Tehran Case, 8 Juni 2011, http://www.kompasiana.com/immanuelsnotes/teheran-case_5500da73a333110d17510188, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017.
- Rushans Novaly, Mengungkap Ulang Kembali Kasus Bali Nine, 21 Januari 2015, http://www.kompasiana.com/rushanovaly/mengungkap-ulang-kasus-bali-nine_54f90ab3a333110678b47cb diakses pada 7 Septemer 2017.
- Transkrip Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Pertemuan dengan Duta Besar Australia Untuk Indonesia Paul Grigson, Subiaco, 4 Mel

2015, <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/TR15-003.html>, diakses pada 13 September 2017.

Australian Embassy, Head of Mission, <http://indonesia.embassy.gov.au/jakt/HOM.html>, diakses pada 13 September 2015.

Katrin Figge, An Interview with H.E. Paul Grigson, Ambassador of Australia to Indonesia, 8 Januari 2017, <http://nowjakarta.co.id/interview-h-e-paul-grigson-ambassador-australia-indonesia>, diakses pada 13 Septer 2017.

Yulistyo Pratomo, Australia Marah, Tarik Duta Besar Dari Indonesia!, 29 April 2015, <https://www.merdeka.com/dunia/australia-marah-tarik-duta-besar-dari-indonesia.html>, diakses pada 13 September 2017.

Galih Gumelar, Kemlu RI Belum Terima Surat Penarikan Dubes Autralia, 29 April 2015, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429093636-106-49953/kemlu-ri-belum-terima-surat-penarikan-dubes-australia/>, diakses pada 13 September 2017.

Noor Aspasia, JK: Penarikan Dubes Australia Intrik Politik, 29 April 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429191700-12-50140/jk-penarikan-dubes-australia-intrik-politik/>, diakses pada 15 September 2017.

Lily Rusna Fajriah, Australia Tarik Dubes, Ini Reakse Menlu Retno, 29 April 2015, <https://international.sindonews.com/read/995206/40/australia-tarik-dubes-ini-reaksi-menlu-retno-1430276472>, diakses pada 15 September 2017.

Agus Sasongko, MUI: Indonesia tak Perlu Khawatir Soal Penarikan Dubes Belanda dan Brasil, 20 Januari 2015, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/20/nihelq-mui-indonesia-tak-perlu-khawatir-soal-penarikan-dubes-belanda-dan-brasil>, diakses pada 15 September 2015.

Ella Syafputri, Mantan Menlu Australia: Penarikan Duta Besar adalah Langkah Keliru, 30 April 2015, <http://www.antaraneews.com/berita/493717/mantan-menlu-australia-penarikan-dubes-adalah-langkah-keliru>, diakses pada 17 September 2017.

Naomi Woodley, Perdana Menteri Australia yang Baru Akan Kunjungi Indonesia, 3 November 2015,

<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-11-03/perdana-menteri-australia-yang-baru-akan-kunjungi-indonesia/1510668>, diakses pada 3 Oktober 2017.

Jihad Dwidyasa, Gertakan Australia Soal Penghentian Bantuan untuk Indonesia, 6 Meil 2017, <https://news.okezone.com/read/2015/05/05/18/1145093/gertakan-australia-soal-penghentian-bantuan-untuk-indonesia>, diakses pada 3 Oktober 2017.

Victor Maulana, Asustralia Ingin Stop Bantuan, RI: Tak Masalah, 4 Meil 2017, <https://international.sindonews.com/read/997210/40/australia-ingin-setop-bantuan-ri-tak-masalah-1430745862>, diakses pada 3 Oktober 2017.

Damos Dumoli Agusman, Perlindungan Diplomatik Atas Kasus Sumiati, 19 November 2010, <http://www.antaraneews.com/berita/234173/perlindungan-diplomatik-atas-kasus-sumiati>, diakses pada 3 Oktober 2017.

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Januari 2017, <http://www.fiacat.org/the-second-optional-protocol-to-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights>, diakses pada 3 Oktober 2017.

Law Council of Australia, Death Penalty Background, <https://www.lawcouncil.asn.au/policy-agenda/human-rights/death-penalty>, diakses pada 3 Oktober 2017.